RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN TRANSISI 2023-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat Jalan Kawijo Nomor 4, Pengasih, Kulon Progo
Telp (0274) 773270, Fax (0274) 773270
Website https://koperasi.kulonprogokab.go.id, Email koperasi@kulonprogokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmadNya Rencana Strategis Transisi Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026 dapat kami susun. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Propinsi.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangannya telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 – 2026, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, demikian juga sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 tersebut Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo menyusun Renstra Transisi Tahun 2023-2026.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis Transisi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Besar harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam sistem perencanaan baik internal maupun eksternal Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

Wates, Desember 2022

Kepala

Iffah Mufidati, S.H., MM.
NIP. 19700117 199603 2 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang…… 1

1.2 Landasan Hukum…….. 4

1.3 Maksud dan Tujuan…….. 5

1.4 Sistematika Penulisan…….. 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH **7**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah….. 7

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah…….. 10

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah…… 15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah…….. 36

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **37**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah…….. 37

3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD DIY…… 39

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah…… 41

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis……... 46

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN **50**

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Pada Rencana Pembangunan Daerah Kulon Progo 2023-2026…….

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **52**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN **55**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN **64**

BAB VIII PENUTUP **66**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana……..	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo……	16
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo……	19
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2021……..	21
Tabel 2.5	Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2021……..	30
Tabel 2.6	Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo	32
Tabel 2.7	Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2021……..	33
Tabel 2.8	Data Omset dan Aset UMKM Tahun 2017-2021…….	34
Tabel 2.9	Daftar Toko Modern Kerjasama *Take Over* dengan Koperasi (TOMIRA)……..	35
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah……..	37
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Sasaran Dinas Perindagkop DIY Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	39
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	40
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananannya……..	41
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananannya……	42
Tabel 3.6	Identifikasi Isu Strategis……	47
Tabel 3.7	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis……....	48
Tabel 3.8	Nilai Skala Kriteria……	48
Tabel 3.9	Rata-Rata Skor Isu Strategis.....	49

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah…….. 51
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan……..... 53
Tabel 6.1 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo…… 56
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah…… 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya……..	3
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisai Dinas Koperasi dan UKM……	8
Gambar 2.2	Pegawai Berdasarkan Bidang Tahun 2022……...	10
Gambar 2.3	Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2022……	11
Gambar 2.4	Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2022……...	11
Gambar 2.5	Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022……	12
Gambar 2.6	Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022…….	12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat krusial dalam mendorong pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah untuk mengelola dan memanfaatkan semua potensi daerah serta mengembangkan kreatifitas, inisiatif dan prakarsa dalam pembangunan daerah. Salah satu fungsi dan tujuan pembangunan daerah adalah pemberian pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terlindungi, terlayani dalam mengakses atau berpartisipasi dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya regulasi dari pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perencanaan Partisipatif.

Agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 terarah, terpadu, menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah yang merupakan filosofi dari kedua ketentuan tersebut diatas, terutama keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 merupakan amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak secara nasional

diselenggarakan pada tahun 2024. Sebagai konsekuensi dari kebijakan dimaksud, maka Kabupaten Kulon Progo akan terdapat masa transisi menjelang pemilu kepala daerah serentak nasional tahun 2024 dikarenakan telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo berakhir pada tahun 2022. RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan resmi Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 4 (empat) tahun kedepan pada masa transisi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam empat tahun kedepan;
b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra Dinas Koperasi dan UKM sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo, merupakan Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja (Renja). Selain itu Renstra Dinas Koperasi dan UKM merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Koperasi dan UMKM yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Provinsi, kondisi dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahap-tahap : persiapan penyusunan dengan membentuk Tim penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangakat

daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo merupakan dokumen induk arah dan kebijakan pembangunan 4 tahun ke depan (2023-2026), juga disinkronkan dengan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UKM Propinsi DIY, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

Dengan demikian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo berupaya memadukan dan menselaraskan rencana pembangunan Koperasi dan UMKM nasional, provinsi, dengan pertimbangan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Rencana strategis (Renstra) juga dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju.

Adapun skema hubungan Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1. Skema Hubungan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

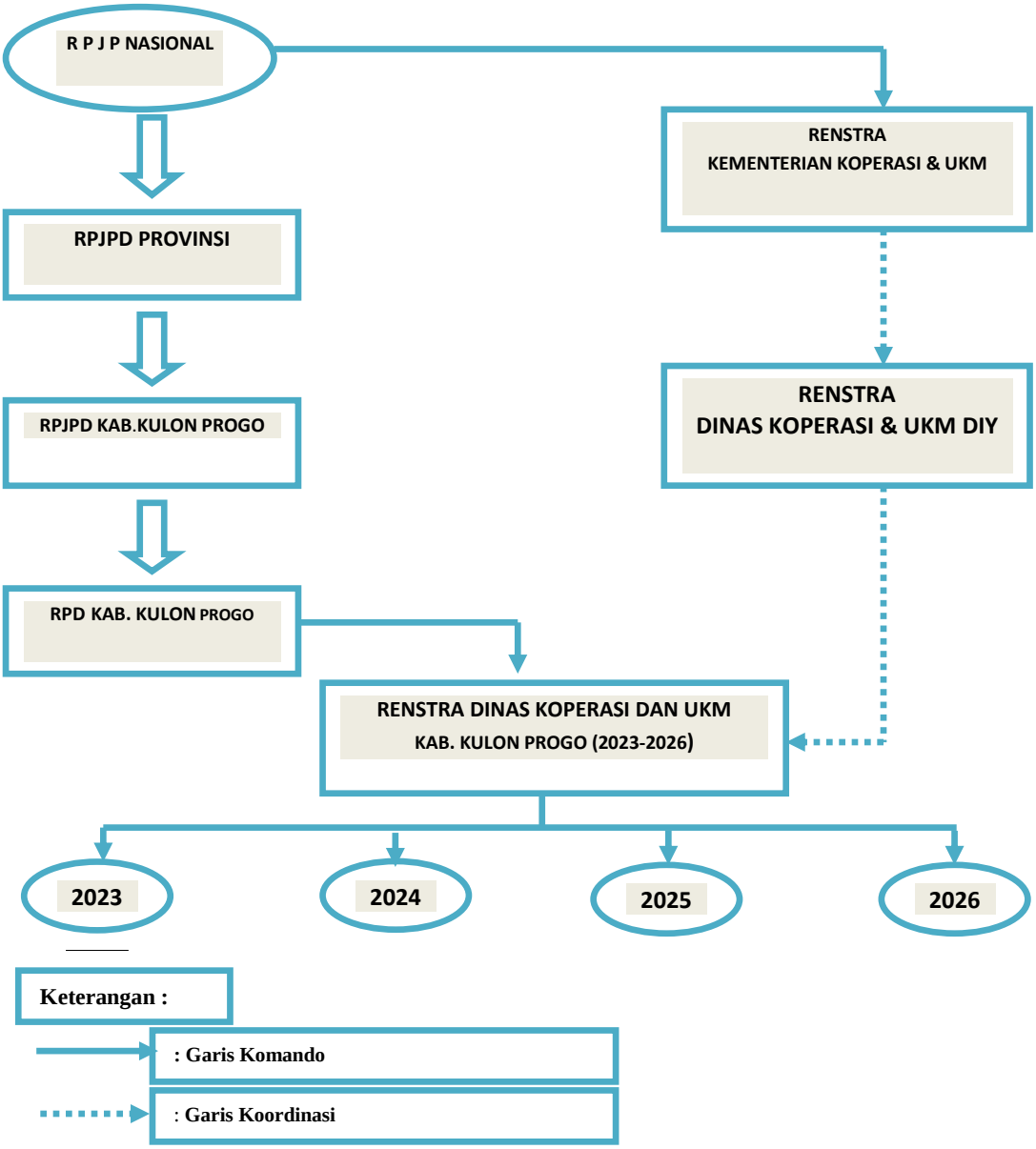

Berdasarkan hasil evaluasi akhir Dokumen Perencanaan Pembangunan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang dilakukan oleh Bappeda, terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026. Oleh karena itu, mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 359, bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis, maka perlu dilakukan perubahan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

1.2 Landasan Hukum

Landasan idiil Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah Pancasila dan landasan konstitusional UUD RI 1945. Sedangkan landasan operasionalnya meliputi ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah sebagai berikut:

a. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah.
c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
d. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
e. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025).
f. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
g. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
i. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

k. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) . 2020-2024 Republik Indonesia.
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
n. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;
o. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
q. Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan produk lokal
r. Perda No. 16 Th 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo;
s. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
t. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan;
u. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Dinas Koperasi dan UKM.
v. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2023-2026 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu empat tahun.
2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026.
3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.
4. Sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Dinas Koperasi dan UKM tahun 2023 - 2026, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 - 2026,

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD DIY

3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Pada Rencana Pembangunan Daerah Kulon Progo 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 116 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang permodalan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
e. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas;
g. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo mengampu Urusan Koperasi dan UMKM 3 bidang yaitu : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Bidang Permodalan dan Bidang Pemberdayaan KUMKM dan 1 Sekretariat.

Tugas masing-masing Bidang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan lembaga, pengelolaan data dan informasi dan pengawasan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM).

c. Bidang Permodalan

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan permodalan fasilitasi pengembangan simpan pinjam.

d. Bidang Pemberdayaan

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia dan pemberdayaan usaha.

Gambar 2.1
Pegawai Berdasarkan Bidang
Tahun 2022

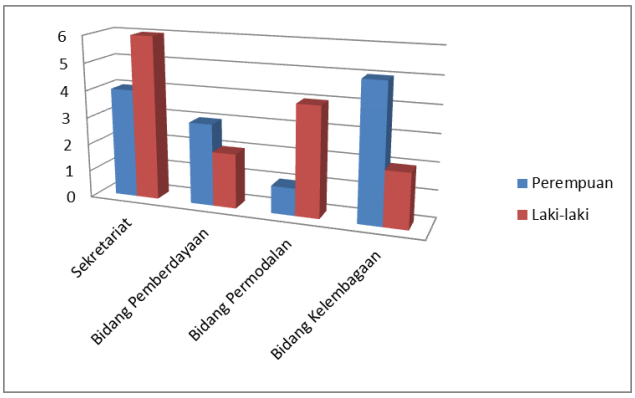

Bidang	Perempuan	Laki-laki
Sekretariat	4	6
Bidang Pemberdayaan	3	2
Bidang Permodalan	1	4
Bidang Kelembagaan	5	2
Jumlah	13	14

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
   Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
   Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
   Kelompok Substansi Lembaga
   Kelompok Substansi Data dan Informasi
   Kelompok Substansi Pengawasan
4. Bidang Permodalan
   Kelompok Substansi Pengembangan Permodalan
   Kelompok Substansi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam
5. Bidang Pemberdayaan
   Kelompok Substansi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
   Kelompok Substansi Pemberdayaan Usaha
6. Unit Pelaksana Teknis
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM

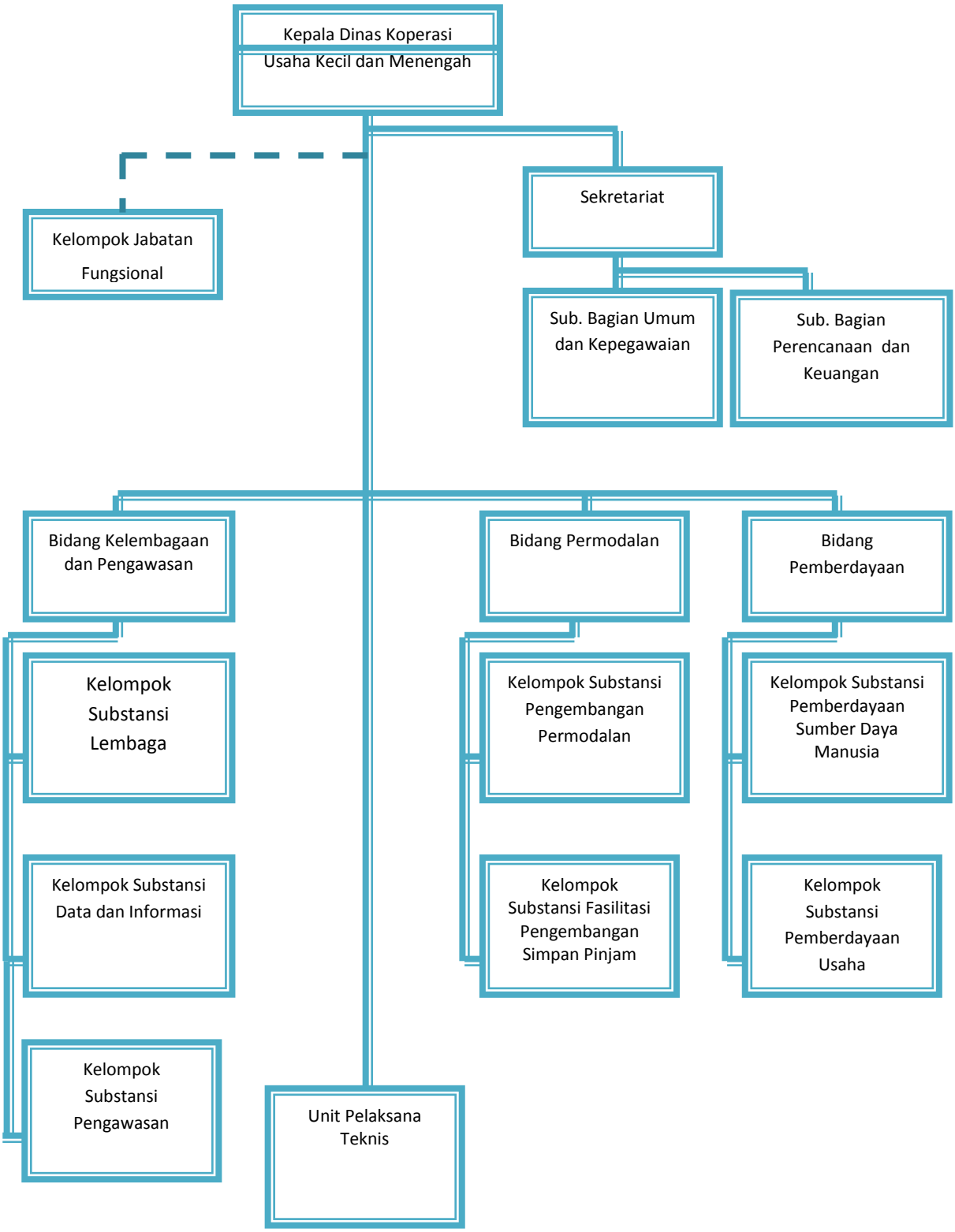

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Gambar 2.3

Pegawai Berdasarkan Golongan

Tahun 2022

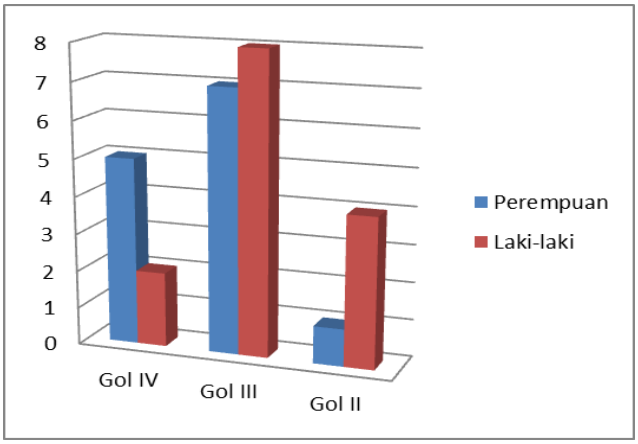

Golongan	Perempuan	Laki-laki
Gol IV	5	2
Gol III	7	8
Gol II	1	4
Jumlah	13	14

Gambar 2.4

Pegawai Berdasarkan Eselon

Tahun 2022

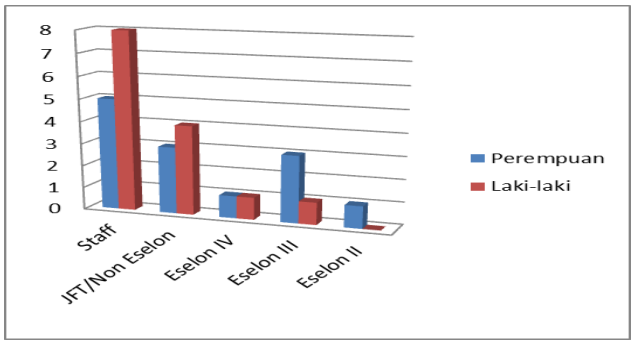

Jabatan	Perempuan	Laki-laki
Staff	5	8
JFT/Non Eselon	3	4
Eselon IV	1	1
Eselon III	3	1
Eselon II	1	0
Jumlah	13	14

Gambar 2.5

Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2022

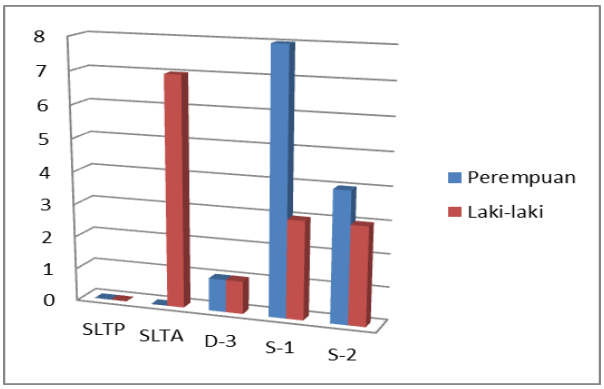

Pendidikan	Perempuan	Laki-laki
SLTP	0	0
SLTA	0	7
D-3	1	1
S-1	8	3
S-2	4	3
Jumlah	13	14

Gambar 2.6

Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022

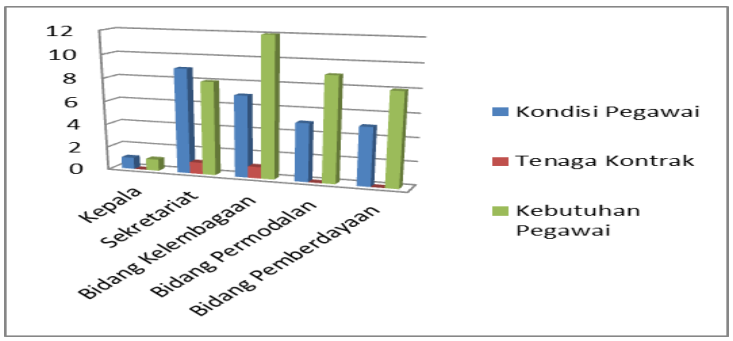

	Kepala	Sekretariat	Bidang Kelembagaan	Bidang Permodalan	Bidang Pemberdayaan
Kondisi Pegawai	1	9	7	5	5
Tenaga Kontrak	0	1	1	0	0
Kebutuhan Pegawai	1	8	12	9	8

Dari gambar-gambar diatas dapat dilihat bahwa kondisi keadaan pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 sejumlah 27 PNS ditambah 2 tenaga kontrak kategori B dan 3 tenaga kontrak kategori A dirasa masih belum mencukupi untuk kinerja yang optimal, karena mendasarkan pada analisis beban kerja, jumlah pegawai yang ideal untuk Dinas Koperasi dan UKM sejumlah 46 orang, ini menunjukkan kondisi pegawai masih kekurangan 14 pegawai, dan berdasarkan analisa kekurangan terjadi banyak pada personil penyiap bahan kebijakan dan pembimbing tekhnis. Tenaga kontrak kategori B merupakan Tenaga Kontrak yang memiliki tugas melaksanakan sebagian ketugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Jabatan Tenaga Kontrak Kategori A Pada Pemerintah Daerah.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (*Kondisi Aset)*

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana

No	Nama Barang/Alat	2020			2021			2022		
		Jml	**Kondisi Baik**	**%**	**Jml**	**Kondisi Baik**	**Persen**	**Jml**	**Kondisi**	**%**
I	**Tanah dan Bangunan**									
1	Tanah	1.000 m	1000 m	100	1.000 m	1000 m	100	1.000 m	1000 m	100
2	Ruangan	4 unit	4 Unit	100	4 unit	4 Unit	100	4 unit	4 Unit	100
II	**Peralatan Kantor dan Rumah Tangga**									
1	Komputer (PC)	9 unit	9 Unit	100	9 unit	9 Unit	100	9 unit	9 Unit	100
2	Laptop	18 unit	18 Unit	100	18 unit	18 Unit	100	18 unit	18 Unit	100
3	Meja kerja	46 bh	39 Unit	84,78	46 bh	39 Unit	84,78	46 bh	39 Unit	84,78
4	Meja rapat	9 bh	9 unit	100	9 bh	9 unit	100	9 bh	9 unit	100
5	Meja panjang	1 bh	0	0	Meja panjang	1 bh	0	0	Meja panjang	1 bh
6	Meja ketik	3 bh	0	0	Meja ketik	3 bh	0	0	Meja ketik	3 bh
7	Meja computer	3 bh	0 Unit	0	Meja computer	3 bh	0 Unit	0	Meja computer	3 bh
8	Meja kursi tamu	1 set	1 set	100	Meja kursi tamu	1 set	1 set	100	Meja kursi tamu	1 set
9	Kursi kayu	45 bh	41 bh	91,11	Kursi kayu	45 bh	41 bh	91,11	Kursi kayu	45 bh
10	Kursi besi	4 bh	0 bh	0	Kursi besi	4 bh	0 bh	0	Kursi besi	4 bh
11	Kursi putar	0	0	0	Kursi putar	0	0	0	Kursi putar	0
12	Almari kayu	10 bh	10 bh	100	Almari kayu	10 bh	10 bh	100	Almari kayu	10 bh
13	Almari besi	1 bh	1 bh	100	Almari besi	1 bh	1 bh	100	Almari besi	1 bh
14	Filling cabinet kayu	4 bh	4 bh	100	Filling cabinet kayu	4 bh	4 bh	100	Filling cabinet kayu	4 bh
15	Filling cabinet besi	4 bh	1 bh	25	Filling cabinet besi	4 bh	1 bh	25	Filling cabinet besi	4 bh
16	Wereles	2 unit	1 unit	50	Wereles	2 unit	1 unit	50	Wereles	2 unit
17	Kipas Angin	1 unit	0	0	Kipas Angin	1 unit	0	0	Kipas Angin	1 unit

No	Nama Barang/Alat	2020			2021			2022		
		Jml	**Kondisi Baik**	**%**	**Jml**	**Kondisi Baik**	**Persen**	**Jml**	**Kondisi**	**%**
18	AC	6 unit	6 unit	100	AC	6 unit	6 unit	100	AC	6 unit
19	LCD Projector	2 unit	2 unit	100	LCD Projector	2 unit	2 unit	100	LCD Projector	2 unit
20	Layar LCD	2 unit	2 unit	100	Layar LCD	2 unit	2 unit	100	Layar LCD	2 unit
21	Mesin tik	3 unit	1 unit	33,33	Mesin tik	3 unit	1 unit	33,33	Mesin tik	3 unit
22	Faximile	1 unit	1 unit	100	Faximile	1 unit	1 unit	100	Faximile	1 unit
23	Mesin Absen	1 unit	1 unit	100	Mesin Absen	1 unit	1 unit	100	Mesin Absen	1 unit
25	Kursi lipat	50 bh	50 bh	100	Kursi lipat	50 bh	50 bh	100	Kursi lipat	50 bh
26	Meja LCD	1 buah	0 buah	0	Meja LCD	1 buah	0 buah	0	Meja LCD	1 buah
27	Brankas	1 buah	0 buah	0	Brankas	1 buah	0 buah	0	Brankas	1 buah
28	Elatase	1 buah	1 buah	100	Elatase	1 buah	1 buah	100	Elatase	1 buah
29	Printer	7 unit	7 unit	100	Printer	7 unit	7 unit	100	Printer	7 unit
30	Kamera	1 unit	0 unit	100	Kamera	1 unit	0 unit	100	Kamera	1 unit
31	Kursi direktur	1 unit	1 unit	100	Kursi direktur	1 unit	1 unit	100	Kursi direktur	1 unit
32	Meja biro	1 unit	1 unit	100	Meja biro	1 unit	1 unit	100	Meja biro	1 unit
33	Lemari kaca	6 bh	6 bh	100	Lemari kaca	6 bh	6 bh	100	Lemari kaca	6 bh
III	**Alat-alat angkutan**									
1	Kendaraan Roda 4	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100
2	Kendaraan Roda 2	12 unit	11 unit	91,67	12 unit	11 unit	91,67	12 unit	11 unit	91,67

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Urusan Koperasi dan UKM mendasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri yang menyertainya. Penyelenggaraan urusan ini diharapkan dapat membangun Kulon Progo yang sejahtera dengan berbasis pada Koperasi dan UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 4 Pebruari 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka setiap urusan dalam Pemerintahan harus memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk Koperasi dan UMKM IKK yang ditampilkan adalah capaian kinerja untuk kesehatan Koperasi dengan rumus perbandingan antara jumlah Koperasi sehat dan jumlah seluruh Koperasi serta kuantitas Usaha Mikro Kecil dengan rumus jumlah Usaha Mikro Kecil dibandingkan jumlah seluruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan sesuai dengan Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Dinas maka ada beberapa indikator lain dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo antara lain jumlah Koperasi baru, Koperasi aktif, jumlah UMKM.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	IKU																			
1	Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi			%	502.424.356	503.117.206	504.034.267	505.142.447	506.142.447	507.825.475	503.389.843	607.917.336	655.538.672	682.080.889	1.154.593.781	100,19	120,83	130,05	135,02	228,11
2	Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi			%	19,11	19,12	19,13	19,14	19,15	19,16	19,11	19,38	16,57	9,99	17,66	100,00	101,36	86,61	52,19	92,22

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun						Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Indikator Kinerja Program																			
1	Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro			%	47,42	49,98	51,92	52,00	52,54	53,38	44,15	51,57	58,14	51,09	51,88	93,10	103,18	111,98	98,25	98,74
2	Indeks Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			%	33,44	33,93	27,80	29,78	31,77	33,78	33,62	25,82	27,86	13,89	27,47	100,54	76,09	100,21	46,64	86,46
3	Nilai Kesehatan KSP/USP Koperasi			%	46,70	48,14	39,45	40,19	41,47	43,37	35,53	38,88	41,80	38,78	40,86	76,08	80,76	105,95	96,49	98,53

Dalam tabel 2.2 diatas dapat dilihat bahwa fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari rasio capaian target yang tinggi dan terus meningkat, dimana pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 IKP Dinas Koperasi dan UKM mencapai lebih dari 100%, sedangkan untuk persentase indeks pengawasan dan pemeriksaan koperasi tidak tercapai sesuai target. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola terutama dari sisi kemampuan managerial dan jiwa kewirausahaan pengelola Koperasi. Selain itu sesuai kebijakan pemerintah pusat, yang mendorong koperasi berkualitas bukan kuantitas, koperasi banyak yang dibubarkan (Keputusan Menkop UKM Nomer 153 tahun 2018). Pada Tahun 2019 IKP Dinas Koperasi dan UKM kembali mengalami peningkatan dan capaian lebih dari 100%. Akan tetapi pada Tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena pada Tahun 2020 terdapat pandemi *Covid 19* yang sangat berdampak terhadap perekonomian, tidak terkecuali Koperasi dan UMKM. Pada Tahun 2021 capaian tidak mencapai 100% akan tetapi jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sudah mengalami peningkatan. Meskipun pada Tahun 2021 masih terdapat pandemi *Covid 19* namun pada Tahun 2021 telah dilakukan upaya untuk pemulihan ekonomi nasional.

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan 2.4.

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Kulon Progo

Uraian	*Anggaran pada Tahun*						*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio antara Anggaran dan Realisasi Tahun*					*Rata-rata Pertumbuhan*	
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*Anggaran*	*Realisasi*
Belanja Tidak Langsung	**1.786.957.987,25**	**1.763.731.629,00**	**1.724.280.711,29**	**1.765.394.156,82**	**1.765.394.157,00**	**1.803.648.977,00**	**1.765.331.412,00**	**1.704.588.651,00**	**1.696.702.191,00**	**1.555.471.666,00**	**1.661.742.478,00**	**0,98**	**0,96**	**0,98**	**0,88**	**0,94**	**0,2**	**(1,35)**
Belanja Pegawai	1.786.957.987,25	1.763.731.629,00	1.724.280.711,29	1.765.394.156,82	1.765.394.157,00	1.803.648.977,00	1.765.331.412,00	1.704.588.651,00	1.696.702.191,00	1.555.471.666,00	1.661.742.478,00	0,98	0,96	0,98	0,88	0,94	0,2	(1,35)
Belanja Langsung	**1.600.362.100,00**	**837.637.250,00**	**1.934.749.700,00**	**1.464.696.826,00**	**1.411.222.548,00**	**860.795.608,00**	**1.447.394.048,00**	**774.522.986,00**	**1.888.131.872,00**	**1.417.442.131,00**	**1.199.949.990,00**	**0,90**	**0,92**	**0,97**	**0,96**	**85,02**	**3,27**	**14,25**
Belanja Pegawai	92.924.000,00	103.562.000,00	97.176.000,00	87.091.000,00	0,00	0,00	92.634.000,00	102.687.000,00	96.666.000,00	86.971.000,00	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00	(1,70)	(1,68)
Belanja Barang dan Jasa	1.466.902.300,00	670.271.950,00	1.284.148.700,00	1.164.255.826,00	1.408.673.148,00	858.374.608,00	1.314.548.748,00	610.992.766,00	1.243.536.452,00	1.118.131.481,00	1.197.632.990,00	0,89	0,91	0,96	0,96	0,85	1,97	11,76
Belanja Modal	40.535.800,00	63.803.300,00	553.425.000,00	213.350.000,00	2.549.400,00	2.421.000,00	40.211.300,00	60.843.220,00	547.929.420,00	212.339.650,00	2.317.000,00	0,99	0,95	0,99	0,99	0,90	131,90	172,93

Pada tabel 2.3 di atas terlihat bahwa Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik turun untuk setiap tahunnya, hal ini dikarenakan adanya beberapa pegawai Dinas Koperasi dan UKM yang purna tugas dan terdapat beberapa penambahan pegawai. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung terjadi kenaikan dan penurunan, hal ini terjadi dikarenakan target serta kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya berbeda-beda. Untuk Tahun 2019 terutama anggaran untuk belanja barang dan jasa terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan ada rehab atap gedung kantor dan pengadaan kendaraan mobil dinas. Sedangkan Tahun 2020 dan 2021 terdapat *refocussing* anggaran sebagai upaya pencegahan dan penanganan pandemi *Covid 19*. Selain itu terdapat penambahan anggaran sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2021

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*				
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**117.000.000**	**111.366.200**	**182.566.700**	**-**	**-**	**116.949.814**	**109.947.355**	**182.131.242**	**-**	**-**	**0,99**	**0,98**	**0,99**	**-**	**-**
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	38.006.000	38.006.000	94.866.700	-	-	38.002.700	37.983.500	94.678.200	-	-	0,99	0,99	0,99	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan	17.000.000	17.000.000	18.000.000	-	-	16.992.200	16.966.000	17.800.000	-	-	0,99	0,99	0,98	-	-
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	61.994.000	56.360.200	69.700.000	-	-	61.954.914	54.997.855	69.653.042	-	-	0,99	0,97	0,99	-	-
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	**162.842.000**	**188.759.500**	**716.616.250**	**-**	**-**	**147.391.059**	**157.385.241**	**686.444.451**	**-**	**-**	**0,90**	**0,83**	**0,95**	**-**	**-**
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	40.535.800	63.803.300	353.475.000	-	-	40.211.300	60.843.220	349.878.420	-	-	0,99	0,95	0,98	-	-
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	122.306.200	124.956.200	363.141.250	-	-	107.179.759	96.542.021	336.566.031	-	-	0,87	0,77	0,92	-	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	**33.600.000**	**16.000.000**	**47.814.000**	**-**	**-**	**33.173.050**	**15.797.250**	**47.776.350**	**-**	**-**	**0,98**	**0,98**	**0,99**	**-**	**-**
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	19.600.000	2.000.000	10.077.300	-	-	19.453.300	1.921.450	10.077.300	-	-	0,99	0,96	1,00	-	-

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*				
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	5.000.000	5.000.000	6.000.000	-	-	4.741.600	4.953.300	5.984.850	-	-	0,94	0,99	0,99	-	-
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	9.000.000	9.000.000	31.736.700	-	-	8.978.150	8.922.500	31.714.200	-	-	0,99	0,99	0,99	-	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM	**161.713.800**	**250.713.800**	**429.720.100**	-	-	**159.995.450**	**249.136.825**	**419.101.100**	-	-	**0.98**	**0,99**	0,97	-	-
Kegiatan Peningkatan Permasyarakatan Perkoperasian	43.800.000	182.800.000	88.236.550	-	-	43.579.700	181.464.300	85.381.550	-	-	0,99	0,99	0,97	-	-
Penyusunan Data KUMKM	14.938.000	14.938.000	41.964.800	-	-	14.901.500	14.820.950	41.876.425	-	-	0,99	0,99	0,99	-	-
Pelayanan Legalitas dan Kualitas Kelembagaan Koperasi	77.655.475	27.655.475	265.076.450	-	-	76.742.000	27.531.250	258.559.825	-	-	0,98	0,99	0,97	-	-
Penilaian Kesehatan KSP/ USP	25.320.325	25.320.325	34.442.300	-	-	24.772.250	25.320.325	34.283.300	-	-	0,97	1,00	0,99	-	-
Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM	**1.058,450.000**	**224.041.450**	**503.274.600**	-	-	**923.932.250**	**197.190.240**	**496.986.179**	-	-	**0,87**	**0,88**	**0,98**	-	-
Kegiatan Pelatihan Organisai, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi	52.500.000	77.500.000	58.742.850	-	-	52.355.550	76.311.550	58.547.650	-	-	0,99	0,98	0,99	-	-
Kegiatan Pengembangan Usaha KUMKM	986.200.000	126.791.450	421.376.350	-	-	852.699.550	102.453.740	416.183.175	-	-	0,86	0,80	0,98	-	-
Kegiatan Peningkatan Legalitas Produk KUMKM	19.750.000	19.750.000	23.155.400	-	-	18.877.150	18.424.950	22.255.354	-	-	0,95	0,93	0,96	-	-

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*				
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Program Pengembangan Permodalan KUMKM	**66.756.300**	**46.756.300**	**54.758.050**	**-**	**-**	**66.002.425**	**45.581.500**	**54.692.550**	**-**	**-**	**0,98**	**0,97**	**0,99**	**-**	**-**
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP	8.772.100	8.772.100	15.772.100	-	-	8.590.225	8.769.500	15.772.100	-	-	0,97	0,99	1,00	-	-
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha KUMKM	17.984.200	17.984.200	18.985.950	-	-	17.646.200	16.852.000	18.920.750	-	-	0,98	0,93	0,99	-	-
Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM	40.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	39.766.000	19.960.000	19.999.700	-	-	0,99	0,99	0,99	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**-**	**-**	**-**	**161.109.880**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.190.290**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,99	**-**
Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	-	-	-	96.389.130	-	-	-	-	95.522.390,00	-	-	-	-	0,99	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan	-	-	-	17.700.000	-	-	-	-	17.699.900,00	-	-	-	-	0,99	-
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi	-	-	-	47.020.750	-	-	-	-	46.968.000,00	-	-	-	-	0,99	-
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas SDM OPD	**-**	**-**	**-**	**357.919.046**	**-**	**-**	**-**	**-**	**345.295.941**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,96	**-**
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	-	13.350.000	-	-	-	-	13.230.000,00	-	-	-	-	0,99	-
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	-	-	-	344.569.046	-	-	-	-	332.065.941,00	-	-	-	-	0,96	-

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*				
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	**-**	**-**	**-**	**44.595.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.475.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,99	**-**
Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	-	-	-	10.077.300	-	-	-	-	10.053.300,00	-	-	-	-	0,99	-
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	-	-	-	4.072.400	-	-	-	-	4.000.200	-	-	-	-	0,98	-
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	-	-	-	30.445.800	-	-	-	-	30.421.700,00	-	-	-	-	0,99	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM	**-**	**-**	**-**	**264.143.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**264.040.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,99	**-**
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi	-	-	-	11.859.200	-	-	-	-	11.859.200	-	-	-	-	1,00	-
Kegiatan Penguatan Kelembagaan KUMKM	-	-	-	217.652.700	-	-	-	-	217.632.700,00	-	-	-	-	0,99	-
Kegiatan Penyusunan Data KUMKM	**-**	**-**	**-**	34.631.400	**-**	**-**	**-**	**-**	34.548.400,00	**-**	**-**	**-**	**-**	0,99	**-**
Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM	-	-	-	**452.566.700**	-	-	-	-	**419.128.000**	-	-	-	-	0.93	-
Kegiatan Pengembangan Usaha dan Peningkatan Legalitas Produk KUMKM	**-**	**-**	**-**	231.404.700	**-**	**-**	**-**	**-**	200.191.100,00	**-**	**-**	**-**	**-**	0,86	**-**
Kegiatan Pelatihan Organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan KUMKM	-	-	-	221.162.000	-	-	-	-	218.936.900,00	-	-	-	-	0,98	-
Program Pengembangan Permodalan KUMKM	**-**	**-**	**-**	**184.362.400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**184.312.400**	-	-	-	-	0,99	**-**
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Koperasi KSP/USP	-	-	-	83.472.000	-	-	-	-	83.472.000,00	**-**	**-**	**-**	**-**	1,00	-

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*				
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Kegiatan Jaringan Kerjasama dan Pendampingan Bantuan KUMKM	-	-	-	100.890.400	-	-	-	-	100.840.400,00	-	-	-	-	0,99	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	**2.075.660.305**	-	-	-	-	**1.954.549.780**	-	-	-	-	0,94
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	**30.996.600**	-	-	-	-	**30.996.600**	-	-	-	-	1,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	3.110.500	-	-	-	-	3.110.500	-	-	-	-	1,00
Sub Kegatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	27.886.100	-	-	-	-	27.886.100	-	-	-	-	1,00
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	**1.806.342.157**	-	-	-	-	**1.702.690.478**	-	-	-	-	0,94
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	1.765.394.157	-	-	-	-	1.661.742.478	-	-	-	-	0,94
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	37.249.000	-	-	-	-	37.249.000	-	-	-	-	1,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	3.699.000	-	-	-	-	3.699.000	-	-	-	-	1,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	**36.426.600**	-	-	-	-	36.229.600	-	-	-	-	0,99
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	36.426.600	-	-	-	-	36.229.600	-	-	-	-	0,99
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	**2.500.000**	-	-	-	-	**2.225.000**	-	-	-	-	0,89
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	2.225.000	-	-	-	-	0,89

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*				
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	**96.102.448**	-	-	-	-	95.780.380	-	-	-	-	0,99
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	96.102.448	-	-	-	-	95.780.380	-	-	-	-	0,99
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	**103.292.500**	-	-	-	-	86.627.722	-	-	-	-	0,83
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	103.292.500	-	-	-	-	86.627.722	-	-	-	-	0,83
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	-	-	**469.451.700**	-	-	-	-	230.260.500	-	-	-	-	0,49
Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	**469.451.700**	-	-	-	-	230.260.500	-	-	-	-	0,49
Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	238.184.600	-	-	-	-	230.260.500	-	-	-	-	0,96
Sub Kegiatan Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	231.267.100	-	-	-	-	230.260.500	-	-	-	-	0,99
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	-	-	**55.470.700**	-	-	-	-	55.460.100	-	-	-	-	0,99
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	-	-	-	-	**55.470.700**	-	-	-	-	55.460.100	-	-	-	-	0,99

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*				
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Kabupaten/Kota															
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	26.359.000	-	-	-	-	26.359.000	-	-	-	-	1,00
Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	29.111.700	-	-	-	-	29.101.100	-	-	-	-	0,99
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	-	-	-	**449.091.800**	-	-	-	-	417.641.300	-	-	-	-	0,93
Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	**231.884.450**	-	-	-	-	231.879.300	-	-	-	-	0,99
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	-	-	-	231.884.450	-	-	-	-	231.879.300	-	-	-	-	0,99
Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	**217.207.350**	-	-	-	-	185.762.000	-	-	-	-	0,85
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	-	-	-	-	217.207.350	-	-	-	-	185.762.000	-	-	-	-	0,85
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	-	-	-	-	**126.942.200**	-	-	-	-	126.896.100	-	-	-	-	0,99
Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan	-	-	-	-	**126.942.200**	-	-	-	-	126.896.100	-	-	-	-	0,99

Uraian	*Anggaran pada Tahun*					*Realisasi Anggaran pada Tahun*					*Rasio Antara Anggaran dan Realisasi pada Tahun*				
	2017 (transisi)	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2017 (transisi)*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan															
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	-	-	34.670.000	-	-	-	-	34.624.000	-	-	-	-	0,99
Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	-	-	-	-	14.897.000	-	-	-	-	14.897.000	-	-	-	-	1,00
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	-	-	77.375.200	-	-	-	-	77.375.100	-	-	-	-	0,99

Pada tabel 2.4 di atas terlihat Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo dari Tahun 2017-2021 menunjukkan adanya perubahan fluktuatif di dalam realisasi keuangan. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakoptimalan di dalam realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran akibat terdapat sisa lelang dari komponen pihak ke-3 karena penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran, perbedaan besar terjadi pada program pemeriksaan dan pengawasan koperasi hal ini disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya pandemi *covid 19* sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada waktu tersebut dan harus dilakukan penundaan. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan anggaran dan belanja.

2.3.2. Perkembangan Koperasi Tahun 2017 – 2021

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Data Perkembangan Koperasi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2021.

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah koperasi	Unit	365	261	267	274	276
2.	Jumlah anggota	Orang	88.367	57.805	76.025	78.545	76.984
3.	Jumlah simpanan	Rp.000	107.096.889	125.614.492	145.059.989	165.636.467	175.264.813
4.	Jumlah modal sendiri	Rp.000	103.016.694	111.574.087	144.529.815	139.834.403	147.979.434
5.	Jumlah modal luar	Rp.000	167.928.567	175.332.128	197.878.289	222.321.748	232.937.212
6.	Volume usaha	Rp.000	222.804.434	169.089.844	238.633.899	234.276.660	268.172.376
7.	Jumlah SHU	Rp.000	5.925.122	5.812.026	7.177.774	5.381.272	5.885.049
8.	Jumlah asset	Rp.000	270.600.422	286.906.215	343.220.367	363.858.421	380.768.255

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2022

Data perkembangan koperasi aktif tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

No	Kecamatan	2017			2018			2019			2020			2021		
		Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%	Aktif	Jml	%
1.	Temon	27	34	79,41	16	28	57,42	23	27	85,18	23	27	85,18	23	27	85,19
2.	Wates	66	100	66.00	53	66	80,30	62	69	89,85	61	68	89,70	60	67	89,55
3.	Panjatan	10	17	58,56	7	10	70,00	8	11	72,72	8	11	72,72	8	11	72,73
4.	Galur	16	23	69,56	10	16	62,50	11	16	68,75	11	16	68,75	12	17	70,59
5.	Lendah	15	16	93,75	13	15	86,66	14	15	93,33	14	15	93,33	14	15	93,33
6.	Sentolo	20	26	76,92	12	21	57,14	19	22	86,36	19	22	86,36	20	23	86,96
7.	Pengasih	36	51	70,58	32	37	86,48	34	36	94,44	37	39	94,87	38	40	95,00
8.	Kokap	16	26	61,53	12	16	75,00	19	19	100,00	22	22	100,00	22	22	100,00
9.	Girimulyo	9	12	75,00	8	9	88,88	7	9	77,78	7	9	77,77	8	10	80,00
10.	Nanggulan	14	22	63,63	9	14	64,28	12	14	85,71	13	15	86,67	12	14	85,71
11.	Kalibawang	13	18	72,22	11	14	78,57	12	13	92,30	12	13	92,30	12	13	92,31
12.	Samigaluh	15	20	75,00	11	15	73,33	14	16	87,50	15	17	88,23	15	17	88,24
	Jumlah	**257**	**365**	**70,41**	**193**	**261**	**73,94**	**235**	**267**	**88,01**	**242**	**274**	**88,32**	**244**	**276**	**88,41**

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2022

Pemberdayaan UMKM mampu menumbuhkan UMKM dengan data perkembangan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Data Perkembangan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2021

No	Sektor Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan	1.912	1.827	1.731	3.484	3.546
2.	Pertambangan dan Penggalian	53	45	45	n.a.	n.a.
3.	Industri Pengolahan	20.105	18.024	18.682	18.677	17.295
4.	Bangunan	211	358	258	146	127
5.	Perdagangan, Hotel dan Restoran					
	a. Hotel dan Restoran	59	257	467	641	614
	b. Pedagang Pasar	2.669	4.862	7.975	8.062	7.897
	c. Pedagang di luar pasar	9.336	9.306	10.325	10.436	10.944
	d. Pedaki	113	113	713	713	1.560
6.	Pengangkutan dan Komunikasi	98	354	189	47	585
7.	Jasa-jasa	107	371	390	288	359
	Jumlah	**34.698**	**35.457**	**40.775**	**42.493**	**42.927**

Sumber data: Kompilasi dan olahan berbagai sumber, 2022

Tabel 2.8

Data Omset dan Aset UMKM Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Omset UMKM yang mendapat fasilitasi (Rp)	%	Jumlah Aset (Rp)	%	Jumlah Omset (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	33,784	28,685,097,040	19.1	218,787,580,527	2.21	473,824,301,776	1.89
2018	35.457	41.750.300.000	46	223.573.440.600	2	484.188.952.000	2
2019	40.730	50.009.996.000	19,7	256.822.242.000	14,8	534.198.948.000	10,3
2020	42.493	54.950.000.000	9,8	231.140.017.800	(10)	347.198.948.000	(35)
2021	42.927	64.655.000.000	17,66	233.497.645.981	1,02	350.670.937.480	1

Keterangan : Kolom 4,6,8 adalah prosentase Peningkatan UMKM

Sumber data: Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2022

2.3.3 Jumlah Toko Modern Kerja sama *Take Over* dengan Koperasi (TOMIRA) Menurut Kapanewon Tahun 2017-2021

Tabel 2.9

No.	Kapanewon	Mulai Kerjasama Tahun				
		s.d 2017	2018	2019	2020	2021
1.	Temon	1	-	-	5	-
2.	Wates	5	3	3	5	-
3.	Panjatan	-	-	-	-	-
4.	Galur	2	-	-	1	-
5.	Lendah	-	-	-	-	-
6.	Sentolo	2	-	-	-	-
7.	Pengasih	-	-	-	2	-
8.	Kokap	-	-	-	-	-
9.	Girimulyo	1	-	-	-	-
10.	Nanggulan	1	-	-	1	-
11.	Kalibawang	-	-	-	-	-
12.	Samigaluh	1	-	-	-	-
	Jumlah	**13**	**3**	**3**	**14**	**0**

Sumber data: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, 2022

Perkembangan Toko Milik Rakyat dari Tahun 2017-2021 berjumlah 33 ToMiRa yang tersebar di 12 Kapanewon. Toko Milik Rakyat (ToMiRa) merupakan kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menindaklanjuti permasalahan maraknya toko modern berjejaring/waralaba yang berdampak negatif terhadap keberadaan pasar tradisional dan pelaku usaha kecil. ToMiRa diharapkan dapat membangun jaringan yang lebih luas untuk mengoptimalkan pasokan produk UMKM asli Kulon Progo ke dalam gerai ToMiRa. Diharapkan keberadaan ToMiRa mempunyai dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaan UMKM Kulon Progo. Pada Tahun 2021 tidak terdapat *Take Over* ToMiRa dikarenakan terdapat kebijakan dari Pemerintah Kabupaten bahwa perlu dilakukan moratorium terhadap Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sehingga tidak dilakukan *Take Over* pada Tahun 2021. Dan pada tahun 2021 bulan Desember telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan yang membatalkan Perda No. 11 tahun 2011 tersebut.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM selaras dengan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya Koperasi dan UMKM yang berkualitas yang selanjutnya menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka optimalisasi pembina dan penggiat Koperasi dan UMKM menjadi satu kunci pokok. Selain itu terdapat beberapa tantangan dan sekaligus peluang untuk mencapai hal tersebut.

2.4.1 Tantangan dan Peluang

Peluang :

a. Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM
b. Tersedianya potensi usaha dan investasi
c. Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan Pangsa pasar yang semakin terbuka
d. Berkembangnya produk unggulan daerah
e. Akses permodalan luas
f. Berdirinya kelompok/organisasi berbasis UMKM
g. Tersedianya SDM/SDA yang relatif besar
h. *Perkembangan Teknologi Informasi*
i. Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwira usaha cukup besar
j. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang;
k. Adanya Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo
l. Dibukanya jalur bedah menorah di Kabupaten Kulon Progo
m. Kebijakan dan regulasi pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM

Tantangan :

a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap manajemen, keuangan dan mekanisme kerja Koperasi
b) Penciptaan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan usaha dan Pembiayaan bagi UMKM
c) Adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menyebabkan persaingan ketat, kemajuan teknologi cepat, pasar semakin *demanding* dan dinamis
d) Pemulihan Ekonomi Nasional ditengah pandemi *Covid 19*.
e) Semakin meningkatnya penggunaan teknologi tepat guna

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan UKM berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang kelembagaan KUMKM, permodalan KUMKM, pemberdayaan KUMKM dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi dan UKM masih menghadapi beberapa permasalahan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM	Lemahnya kapasitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM	- UU No. 25 Tahun 1992 - UU No. 20 Tahun 2008 - UU No. 11 Tahun 2020 - PP No. 7 Tahun 2021	- Bimbingan teknis dan pendampingan - Rekomendasi Pendirian dan pengawasan	- Kewenangan penerbitan badan hukum - Pembubaran koperasi pada kementerian Koperasi dan UKM	Masih lemahnya kualitas kelembagaan KUMKM
					Masih lemahnya kemampuan pengelolaan permodalan KUMKM
					Masih lemahnya pengawasan terhadap KUMKM

					Kurang akuratnya data KUMKM
	Rendahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM	- UU No. 25 Tahun 1992 - UU No. 20 Tahun 2008 - UU No. 11 Tahun 2020 - PP No. 7 Tahun 2021	- Bimbingan teknis dan pendampingan - Rekomendasi Pendirian dan pengawasan	- Hak untuk menyalurkan bantuan permodalan ada pada Perbankan dan Lembaga (seperti LPDB)	Keterbatasan kemampuan SDM pengelola koperasi
					Keterbatasan sumber informasi akses pemasaran
	Lambatnya pertumbuhan wirausaha baru	- UU No. 25 Tahun 1992 - UU No. 20 Tahun 2008 - UU No. 11 Tahun 2020 - PP No. 7 Tahun 2021	- Bimbingan teknis dan pendampingan - Rekomendasi Pendirian dan pengawasan	Adanya persaingan usaha dunia global	Keterbatasan akses permodalan bagi KUMKM
					Kurangnya jiwa entrepreneurship pelaku UMKM

Dalam Tabel 3.1 terlihat bahwa permasalahan pelayanan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo adalah belum optimalnya kinerja Koperasi dan UMKM yang berakibat pada kurangnya daya saing produk KUMKM. Belum optimalnya kinerja KUMKM ini berimplikasi pada rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat pelaku KUMKM.

Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi selaras dengan Pemberdayaan Ekonomi kerakyatan yang tercermin pada terciptanya UMKM yang tangguh dan mandiri, serta menjadi salah satu pemicu dan pemacu bergeraknya roda perekonomian daerah. Namun seiring dengan semakin derasnya dinamika globalisasi dan pasar bebas maka Koperasi yang tangguh, kuat dan mandiri merupakan prasyarat wajib dalam menghadapi kondisi tersebut sehingga tercipta suatu kondisi perekonomian yang *pro public.*

3.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Sasaran Dinas Perindagkop DIY dan Sasaran Kemenkop UKM RI

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo berdasarkan Sasaran jangka menengah renstra Dinas Perindagkop DIY dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Dinas Perindagkop DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Dinas Perindagkop DIY	Permasalahan Pelayanan Dinkop UMKM Kulon Progo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif	Kurang daya saing produk Koperasi dan UKM	Keterbatasan jiwa kewirausahaan dan kemampuan managerial KUMKM serta kurangnya sarana prasarana produksi dan kerjasama/kemitraan	Terbukanya luas pasar untuk produk KUMKM

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perindagkop DIY adalah meningkatnya usaha ekonomi produktif, salah satu cara yang ditempuh untuk meningkatkan ekonomi produktif dengan meningkatkan daya saing produk KUMKM merupakan permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo berdasarkan Sasaran jangka menengah Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sasaran Kementerian Koperasi dan UKM RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra Kementerian KUKM	Permasalahan Pelayanan Dinkop UMKM Kulon Progo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan.	Kurang sinergitias diantara stakeholder terhadap pengengembangan KUMKM.	SDM yang belum optimal	Komitmen dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM
2	Peningkatan daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah	Kurang optimalnya perhatian pelaku UMKM terhadap standarisasi produk yang dipasarkan	Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar dan rendahnya daya saing produk Koperasi dan UMKM di pasar internasional	Adanya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar negara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM
3	Meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan.	Kurangnya penguasaan TI untuk meperluas akses pasar, dan akses permodalan.	Kebanyakan Koperasi dan UMKM menggunakan teknologi sederhana, Kurang memanfaatkan teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk dan KUMKM yang belum bankable	Pengembangan berbagai bentuk kerjasama, salah satunya dengan alih teknologi

No	Sasaran Renstra Kementerian KUKM	Permasalahan Pelayanan Dinkop UMKM Kulon Progo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, serta penerapan praktek berkoperasi yang baik oleh masyarakat.	Kurangnya diklat/kursus di bidang perkoperasian.	Kurang kapasitas SDM di bidang perkoperasian	Banyaknya jumlah Koperasi yang ada di semua lapisan masyarakat.

3.3. Telaah RTRW dan KLHS

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Perlayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendoorong
	Pengembangan Koperasi dan UMKM yang disesuaikan dengan zonasi	Klasifikasi dan pengembangan UMKM yang sudah berkembang untuk diarahkan ke sentra/cluster	- Dana, sarana dan Prasarana yang terbatas - Kualitas SDM yang kurang optimal - Pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terbatas	- Komitmen besar Penggiat Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Ekonomi Kerakyatan - Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana KLHS terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pengembangan industri kecil dan menengah seperti kerajinan tas, batik dan gula semut harus memperhatikan pengolahan limbah, penggunaan bahan kimia, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan	Pendampingan SDM, perajin sering terkendala dengan adanya mentality dan education entrepreneurship yang minim	- Dana, sarana dan Prasarana yang terbatas - Kualitas SDM yang kurang optimal - Pengetahuan tentang Teknologi Tepat Guna (TTG) yang terbatas	- Komitmen besar Penggiat Koperasi dan UMKM dalam pengembangan Ekonomi Kerakyatan - Kebijakan dan Regulasi Pemerintah dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan KUMKM

Sebagai perencanaan strategis, implementasi strategi, kebijakan dan program pembangunan jangka menengah mempunyai potensi memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga di dalam RPD disusun KLHS, dari sekian banyak kebijakan, rencana, maupun program, dilakukan perumusan ulang sehingga lahirlah KRP yang terkait dengan isu-isu yang telah ditetapkan. Maka kebijakan, rencana, program yang dapat diidentifikasi menimbulkan dampak lingkungan yang dapat ditelaah untuk urusan Koperasi dan UMKM adalah berkaitan dengan Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis pada pertanian dalam artian luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui strategi Pengembangan dan pemberdayaan industri, kebijakan Mengembangkan kegiatan usaha industri dengan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Selanjutnya Pengaruh Kebijakan dan Program ini terhadap isu pembangunan berkelanjutan adalah secara positif berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan yang relatif tinggi, Posisi strategis sebagai pintu gerbang DIY bagian barat dan Peluang investasi dan dukungan potensi SDA, selain itu dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap Kerentanan wilayah terhadap kerusakan lingkungan.

Dampak negatif terhadap pembangunan berkelanjutan adalah ancaman terjadinya pencemaran lingkungan. Tanpa adanya rambu-rambu lingkungan, dikhawatirkan pengembangan industri kecil dan menengah tidak memperhatikan pengolahan limbah, penggunaan bahan kimia yang berlebihan, penggunaan bahan baku yang tidak ramah lingkungan.

Sedangkan di dalam RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibuat sistem kota di daerah terlihat dalam konteks wilayah serta keterkaitannya satu sama lain, baik secara spasial maupun fungsional terdiri dari :

- Kota Hirarki II

Kota Hirarki kedua meliputi: Sleman, Bantul, Wates, Wonosari, Mlati, Ngaglik, Kasihan, Sewon, Banguntapan, Godean, Piyungan, Srandakan, Prambanan.

- Kota Hirarki III

Kota Hirarki Ketiga meliputi: Temon, Nanggulan, Sentolo, Galur, Kretek, Imogiri, Sedayu, Minggir, Moyudan, Gamping, Tempel, Depok, Pakem, Ngeplak, Kalasan, Berbah, Pakem, Ngemplak, Kalasan, Playen, Semanu, Karangmojo, Nglipar, Semin,
Rongkop.

- Kota Hirarki IV

Kota Hirarki Keempat berorientasi ke kota orde ketiga dan umumnya terletak pada jalan kabupaten meliputi : Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Pajangan, Pandak, Bambangliputo, Sanden, Pundong, Jetis, Plered, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen,

Sedangkan rencana pengembangan infrastruktur wilayah terdiri dari pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, udara, prasarana sumber daya air, energi, telekomunikasi serta prasarana perumahan dan permukiman. Pengembangan jaringan sistem transportasi darat adalah penyesuaian atau peningkatan fungsi dan tingkat pelayanan atau kapasitas jalan dan angkutan di

atasnya. Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat pada jalan arteri primer di Provinsi DIY yaitu:

- Pengembangan jalan yang menghubungkan antara Kota Yogyakarta dan Cilacap melalui Gamping – Sedayu – Sentolo – Wates – Temon Dari lingkar utara ke arah Semarang melalui Sleman dan Tempel
- Dari lingkar utara selatan Yogyakarta ke arah Purworejo (Bandung) melalui Gamping, Sedayu, Sentolo, Wates dan Temon.
- Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang menghubungkan Temon – wates – Galur – Srandakan – Kretek – Panggung – Bambanglipuro – Purwosari – Paliyan – Tanjungsari - Tepus – Girisubo.

Selain itu Rencana pengembangan infrastruktur transportasi darat pada jalan kolektor primer di Provinsi DIY yaitu:

- Dari lingkar utara Yogyakarta ke Kalibawang dan Samigaluh melalui Godean, Moyudan, dan Nanggulan.
- Dari lingkar selatan Yogyakarta ke Bantul menuju wates melalui Pandak, Srandakan, Galur, Panjatan.

Untuk transportasi (angkutan) kereta api, arahan pengembangan yang dapat dikemukakan adalah peningkatan pembangunan jalur *double track* dan parallel dengan jalur yang sudah ada saat ini seperti Pengembangan jalur kereta yang menghubungkan Yogyakarta ke Wates, Yogyakarta ke Surakarta disamping peningkatan kualitas pelayanan. Jalur paralel Yogyakarta – Wates dan Yogyakarta - Surakarta guna mendukung perkembangan *urban corridor* dan aksesibilits arus ulang – alik pekerja yang tinggal di luar Yogyakarta.

Melihat kondisi alamnya, sampai saat ini rencana pengembangan transportasi laut tidak dikembangkan seperti pelabuhan utama tersier, sehingga pengembangannya diarahkan terbatas pada pembangunan pelabuhan ikan seperti di Sadeng dan Glagah yang merupakan TPI yang melayani pasar ikan di Yogyakarta, Surakarta dan kota – kota sekitarnya. Akan tetapi, akan lebih baik jika dikembangkan pelabuhan utama tersier pada beberapa pelabuhan yang sudah ada, dimana pelabuhan tersebut dapat dikembangkan menjadi pelabuhan utama di Provinisi DIY, tetapi dengan melakukan kajian – kajian kondisi alami terlebih dahulu terutama dengan bantuan teknologi terkini.

Untuk Rencana Pengembangan Sumberdaya Air dan Irigasi Rencana pengembangan irigasi di Provinsi DIY adalah dengan meningkatkan pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian irigasi, khusunya Daerah Aliran Sungai (DAS) Opak – Oyo – Progo dan sumber air bawah tanah untuk maksud pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan produktivitas tanah yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Luas DAS Opak – Oyo – Progo sampai saat ini adalah 620.459 Ha yang sebagian besar berada di wilayah Provinsi DIY dan sebagian kecil (195.414 Ha) berada di wilayah Jawa Tengah perlu dikendalikan dari gangguan pemanfaatan ruang di sekitar DAS yang akan menimbulkan masalah atau konflik dengan fungsi DAS itu sendiri. Pemanfaatan dan pengembangan DAS ini sebagai penyangga upaya produksi pangan wilayah, penopang kehidupan dan memberi manfaat sebesar-besanya bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun Rencana Pengembangan Prasarana Energi dan Telekomunikasi Adapun rencana pengembangan prasarana Energi dan Telekomunikasi di Provinsi DIY adalah sebagai berikut :

a. Berkaitan dengan zona pemusatan kegiatan industri di Kawasan Sentolo, Kulon Progo dan Kawasan Pajangan Bantul maka perlu ditingkatkan kapasitas terpasang listrik bagi kegiatan tersebut.
b. Pengembangan alternatif tenaga listrik dari air Waduk Sermo sbesar 0,5 MW dan energi listrik Banyuurip sebesar 51 MW. Selain itu, alternatif pemanfaatan energy listrik yang berasal dari tenaga angin laut kiranya perlu dipertimbangkan.

Sehingga dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM yang disesuaikan dengan zonasi yaitu ;

a. Pengembangan sentra-sentra UMKM yaitu antara lain sentra kerajinan di Sentolo yang dikoordinasikan Koperasi “Serba Usaha Lancar”, sentra batik di Lendah yang dikoordinasikan Kopdit “Sambas”, sentra logam di Bendungan, Wates yang dikoordinasikan KSU “Logam Maju” dan sentra makanan olahan di Wates yang dikoordinasikan KSU “Bina Ria”.

b. Pengembangan Usaha Koperasi di Wilayah – wilayah yaitu ;

- Wates ; Penataan Pedagang kaki Lima di sekitar Alun-alun Wates dan sekitar Kompleks BPD Wates yang dikelola oleh Koperasi Kerns dan pengembangan UKM Mart oleh KPRI Mekar Dinas Pendidikan.
- Sentolo, Kokap, Wates, Lendah, Girimulyo : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk gula semut oleh Koperasi serba usaha Jatirogo.
- Temon ; Dikembangkan UKM Mart oleh KUD Harapan Temon
- Samigaluh : Pengembangan Minyak Atsiri oleh KSU Tunas Maju Samigaluh
- Kalibawang : Pengembangan Pasar Modern oleh KUD Sido Tentrem Kalibawang
- Girimulyo, Samigaluh, Nanggulan dan Kalibawang ; Pengembangan SPBU oleh KUD Sidosubur Samigaluh dan KUD Girikencono Girimulyo.
- Galur dan Lendah : Pengembangan Gudang Produk UMKM oleh KUD Sedyorahayu Galur dan Kios UMKM oleh KUD Makmur Lendah
- Panjatan, Temon, Wates : Pengembangan 9 Koperasi Pesisir baru dalam rangka menghadapi mega proyek dan Optimalisasi pabrik es oleh Koperasi LEPPM3 Panjatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melalui pencermatan terhadap tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaah renstra Perangkat Daerah Propinsi dan telaah Kementerian Koperasi dan UKM dapat diidentifikasi isu isu strategis yang dihadapi dalam pengembangan KUMKM. (Tabel 3.6) sebagai berikut :

Tabel 3.6

Identifikasi Isu Strategis

No	Tingkat Isu	Isu Strategis	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Internasional	Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar	Keunggulan kompetitif produk KUMKM dan keterpihakan pemangku kebijakan terhadap pengembangan KUMKM
2,	Nasional	Masih kurangnya wirausaha baru yang layak dan berkelanjutan.	Peningkatan jiwa kewirausahaan dan peningkatan kemampuan memperluas pasar.
3.	Daerah	Rendahnya kualitas KUMKM yang berakibat pada kurangnya daya saing KUMKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi, Peningkatan pengembangan KUMKM, dan Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM

Setelah diidentifikasi isu-isu strategis yang ada, dilakukan penilaian terhadap isu isu strategis tersebut melalui penyekoran/penilaian, seperti dalam tabel 3.7, tabel 3.8, dan tabel 3.9, untuk menentukan isu paling strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo.

Tabel. 3.7

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot (skor)
1.	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	40
2.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	40
3.	Kesulitan atau kemudahan untuk ditangani	20
	Jumlah	100

Tabel 3.8

Nilai skala kriteria

No	Isu Strategis	Nilai skala kriteria			Total Skor
		1	2	3	
1	Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar	1	1	2	4
2	Masih kurangnya wirausaha baru yang layak dan berkelanjutan.	2	2	1	5
3	Rendahnya kualitas KUMKM yang berakibat pada rendahnya daya saing KUMKM	3	3	3	9

Tabel 3.9

Rata rata skor isu strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata Rata
1	Pasar bebas yang ditandai dengan berlakunya AFTA dan ACFTA dapat menjadi ancaman, karena asimetris dalam penguasaan pasar	360	120
2	Masih kurangnya wirausaha baru yang layak dan berkelanjutan.	240	80
3	Rendahnya kualitas KUMKM yang berakibat pada rendahnya daya saing KUMKM	240	80

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa isu strategis yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulonprogo adalah "**Rendahnya Kualitas KUMKM"** . Rendahnya kwalitas KUMKM sangat mempengaruhi kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan Dinas Koperasi dan UKM dalam mencapai tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah propinsi, hasil telaah terhadap RT/RW, dan analisis terhadap KLHS dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan terhadap koperasi dan UKM adalah peningkatan daya saing KUMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung perekonomian nasioanal.

BAB 4
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.1.1 Tujuan

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

Tujuan akhir program pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Tingkat pendapatan digunakan sebagai salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi, namun bila dilihat lebih jauh peningkatan pendapatan tersebut belum menjamin perbaikan kesejahteraan masyarakat secara luas, karena tingkat pendapatan yang bervariasi antar anggota masyarakat sesuai dengan tingkat penguasaan sumber daya dan kemampuan mengelolanya. Untuk itulah tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat harus diikuti dengan pemerataan, dan hal ini merupakan tujuan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo karena gerakan koperasi telah ada di seluruh lapisan masyarakat dan sebagian besar masyarakat Kulon Progo merupakan pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga dengan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pelaku Koperasi dan UMKM akan secara otomatis diikuti pemerataan.

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

4.1.2 Sasaran

1. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM

Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM akan ditandai dengan meningkatnya volume usaha koperasi dan meningkatnya jumlah omset UMKM yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UKM. Untuk meningkatkan tersebut akan dilakukan upaya upaya melalui : Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Pengembangan SDM Koperasi, Pemberdayaan KUMKM terkait bisnis, dan Pengembangan UMKM terkait Sumber Daya Manusia pelaku UMKM.

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel oleh Dinas Koperasi dan UKM.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	TARGET DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN					
					REALISASI	TARGET				
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	7	9	10
1	Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Nilai rata-rata volume usaha koperasi	Rp (juta)	1.154,59	612,79	685,95	687,21	688,61	690,15
			Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi	Rp (juta)	64.655,00	70.749,11	76.843,23	84.155,8	92.344,48	101.472,65
		Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp (juta)	28,07	29,47	30,87	32,27	33,67	35,07
			Tingkat pengangguran terbuka	%	3,69	3,67	3,65	3,60	3,55	3,50
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan public yang responsive dan akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKIP)	Nilai	A	A	A	A	A	A
			Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

			Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai	85,82	81,26	84,25	84,50	84,75	85,00

BAB 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1. Strategi

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka strategi yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi.
2. Peningkatan pengembangan KUMKM
3. Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM

5.2 Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi melalui pelayanan legalitas dan kualitas koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
2. Meningkatkan pengembangan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, pemantauan/pendampingan pengembangan permodalan, peningkatan legalitas dan kualitas produk UKMKM, dan pengembangan usaha KUMKM.
3. Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pelatihan strategi pemasaran.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat.	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengawasan Koperasi.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan koperasi melalui pelayanan legalitas dan kualitas koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
		Peningkatan pengembangan KUMKM	Meningkatkan pengembangan KUMKM melalui pendataan yang akurat, peningkatan dan pengembangan akses kerjasama usaha KUMKM, pemantauan/pendamping an pengembangan permodalan, peningkatan legalitas dan kualitas produk UKMKM, dan pengembangan usaha KUMKM.
		Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Meningkatkan kualitas SDM koperasi dan UMKM melalui peningkatan pemasyarakatan perkoperasian, pelatihan organisasi manajemen usaha KUMKM, peningkatan jiwa kewirausahaan, dan pelatihan strategi pemasaran.
Terwujudnya tata kelola pemerintaha n yang baik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Peningkatan penunjang urusan pemerintahan Daerah	Meningkatkan capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

			Meningkatkan capaian administrasi keuangan perangkat daerah
			Meningkatkan capaian administrasi umum perangkat daerah
			Meningkatkan capaian ketersediaan pengadaan barang milik daerah
			Meningkatkan capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
			Meningkatkan capaian pemeliharaan barang milik daerah

BAB 6
PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM, maka tabel berikut menyajikan matriks program yang disertai pendanaan indikatif mengacu Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kemendagri No. 50_5889 Tahun 2021 yang akan dilaksanakan selama periode 2023-2026.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2023 s/d 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	**Meningkatnya Kinerja Koperasi dan UMKM**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**1.954,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***100%***	**1.954,50**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**30,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**30,99**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021	2 Dokumen	3,11	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 Dokumen***	**3,11**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulanan, LKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP SKPD	21 Dokumen	27,88	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***21 Dokumen***	**27,88**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**1.702,67**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**1.702,67**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	1.661,74	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***12 Bulan***	**1.661,74**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 Bulan	37,24	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***12 Bulan***	**37,24**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Capaian Kinerja Keuangan Semester, Laporan Keuangan	14 Dokumen	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***14 Dokumen***	**3,69**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**36,22**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**36,22**		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	36,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***12 Bulan***	**36,22**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**2,22**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**2,22**		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kantor (Printer 1 unit)	1 Unit	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***1 Unit***	**2,22**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**95,78**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**95,78**		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	12 Bulan	95,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***12 Bulan***	**95,78**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**86,62**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**86,62**		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembayaran perpanjangan STNK, listrik, air dan telephone	12 Bulan	86,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***12 Bulan***	**86,62**	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (8 AC, 3 mesin ketik, 3 komputer, 3 printer, 3 laptop, 13 motor dan 3 mobil)	36 Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***36 Unit***	-		
			Penyediaan peralatan kantor, barang penerangan listrik dan peralatan kebersihan	12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***12 Bulan***	-		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**27,47%**	**307,14**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***27,47%***	**307,14**		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			**307,14**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**307,14**		
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	Bintek Pengembangan Bisnis	25 UMKM	76,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 UMKM*	76,88	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Bintek peningkatan kualitas produk UMKM (Pemasok ToMiRa)	25 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 UMKM*	-	-	-
			Izin BPOM (DAK Non Fisik)	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Pameran Manunggal Fair	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			Pelatihan Pengolahan Makanan (DAK Non Fisik)	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			Pelatihan Riset Makanan Dalam Kaleng (Makaleng) (DAK Non Fisik)	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			Pendaftaran HKI	10 Merk		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10 Merk*	-	-	-
			Sosialisasi HKI (P-IRT, BP-Pom, Halal dan standar mutu produk)	25 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 UMKM*	-	-	-
			Ekspor gula semut	1 Koperasi Ekspor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1 Koperasi Ekspor*	-	-	-
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Diklat Akuntasi	25 Orang	230,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 Orang*	230,26	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Diklat Auditing	25 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 Orang*	-	-	-
			Pelatihan Kewirausahaan	25 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 Orang*	-	-	-
			Peningkatan pemasaran online untuk produk lokal	50 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*50 Orang*	-	-	-
			Kurasi Produk UMKM	40 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*40 UMKM*	-	-	-
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Nilai Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**40,86%**	**55,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***40,86%***	**55,45**	**-**	**-**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			**55,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**55,45**	**-**	**-**
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek KSP/USP Kulon Progo	25 Orang	26,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 Orang*	26,35	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Laporan pemantauan pengelolaan koperasi KSP/USP	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1 Dokumen*	-		
			Pelatihan Manajemen Profesional Koperasi (DAK Non Fisik)	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan pendampingan/ pemantauan bantuan yang diberikan kepada warga miskin produktif	1 Dokumen	29,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1 Dokumen*	29,10	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Pelatihan Kewirausahaan dan Peningkatan Kemitraan UMKM (DAK Non Fisik)	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Pengembangan koperasi supplier e-warong	2 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 UMKM*	-	-	-
			Sosialisasi / koordinasi kemitraan dengan Perbankan/BUMN/BUMD	60 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*60 Orang*	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			**417,63**												**417,63**		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**51,88%**	**231,87**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**51,88%**	**231,87**		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	Pelatihan Manajemen Profesional Koperasi	50 Orang	231,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	231,87	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Peningkatan Kapasitas Koperasi	34 Koperasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 Koperasi			
		Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**27,47%**	**185,76**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27,47%**	**185,76**		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Ijin BPOM	10 Ijin	185,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Ijin	185,76	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kemitraan UMKM	50 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 UMKM			
			Pelatihan pengolahan makanan	25 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 UMKM			
			Pelatihan riset makanan dalam kaleng (Makaleng)	25 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 UMKM			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**51,88%**	**126,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***51,88%***	**126,88**	**-**	**-**
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**-**	**-**	**126,88**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**126,88**	**-**	**-**
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Database KUMKM (per kelompok, per jenis, sekunder/primer, konvensional/ syariah)	4 Database	34,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4 Database*	34,62	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Profil KUMKM	35 Profil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*35 Profil*	-	-	-
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pembinaan/ pengawasan koperasi	8 Koperasi	14,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*8 Koperasi*	14,89	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Penilaian Kesehatan KSP/USP	114 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*114 Koperasi*	-	-	-
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bimtek perkoperasian	50 Koperasi	77,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*50 Koperasi*	77,37	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Lomba tangkas terampil perkoperasian	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Peningkatan Kapasitas Koperasi (DAK Non Fisik)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Peningkatan kapsitas koperasi sektor riil	10 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*10 Koperasi*	-	-	-
			Perijinan akta pendirian	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 Dokumen*	-	-	-
			Perubahan AD	4 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*4 Dokumen*	-	-	-
			Sarasehan hari koperasi	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*150 Orang*	-	-	-
			Sosialisasi perkoperasian kopsis	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			Sosialisasi perkoperasian untuk pokmas	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
			Sarasehan hari koperasi	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*150 Orang*	-	-	-
			Bimbingan Teknis Penguatan Koperasi Pengelola ToMiRa	5 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5 Koperasi*	-	-	-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**100%**	**2.134,37**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***100%***	**2.134,37**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**-**	**-**		**46,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**46,69**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022	-	-	2 Dokumen	16,63	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 Dokumen*	16,63	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Rencana Strategis Perangkat Daerah Masa Transisi 2023-2026	-	-	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	*1 Dokumen*	-		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Bulanan, Triwulanan, LKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD dan Penerapan SPIP SKPD	-	-	21 Dokumen	30,06	-	-	-	-	-	-	-	-	*21 Dokumen*	30,06	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**-**	**-**		**1.814,12**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.814,12**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	-	-	12 Bulan	1.765,39	-	-	-	-	-	-	-	-	*12 Bulan*	1.765,39	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	-	-	12 Bulan	45,04	-	-	-	-	-	-	-	-	*12 Bulan*	45,04	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Capaian Kinerja Keuangan Semester, Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun	-	-	14 Dokumen	3,69	-	-	-	-	-	-	-	-	*14 Dokumen*	3,69	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**-**	**-**		**30,53**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,53**		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelatihan Ekspor bagi Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	-	-	3 Orang	30,53	-	-	-	-	-	-	-	-	*3 Orang*	30,53	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		**-**	**-**		**44,08**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44,08**		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jamuan rapat dan tamu, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah	-	-	12 Bulan	44,08	-	-	-	-	-	-	-	-	*12 Bulan*	44,08	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**-**	**-**		**2,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,42**		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana kantor (Alat pemadam kebakaran 1 unit, Tangga ruangan 1 unit)	-	-	2 Unit	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 Unit*	2,42	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**-**	**-**		**96,10**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,10**		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perkantoran (jasa persuratan, jasa pegawai tidak tetap) dan tersedianya bahan dan peralatan kantor (alat tulis kantor, cetak, penggandaan dan bahan pustaka)	-	-	12 Bulan	96,10	-	-	-	-	-	-	-	-	*12 Bulan*	96,10	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**-**	**-**		**100,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,43**		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembayaran perpanjangan STNK, listrik, air dan telephone	-	-	12 Bulan	100,43	-	-	-	-	-	-	-	-	*12 Bulan*	100,43	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (8 AC, 3 mesin ketik, 3 komputer, 3 printer, 3 laptop, 1 LCD, 13 motor dan 3 mobil)	-	-	37 Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	*37 Unit*	-		
			Penyediaan peralatan kantor, barang penerangan listrik dan peralatan kebersihan	-	-	12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	*12 Bulan*	-		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**-**	**-**	**33,78%**	**354,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***34%***	**354,77**		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**-**	**-**		**354,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**354,77**		
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek perkoperasian	-	-	50 Koperasi	78,58	-	-	-	-	-	-	-	-	*50 Koperasi*	78,58	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Lomba tangkas terampil perkoperasian	-	-	100 Siswa		-	-	-	-	-	-	-	-	*100 Siswa*	-		
			Peningkatan kapasitas koperasi sektor riil	-	-	10 Koperasi		-	-	-	-	-	-	-	-	*10 Koperasi*	-		
			Perijinan akta pendirian	-	-	5 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	*5 Dokumen*	-		
			Perubahan AD	-	-	3 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	*3 Dokumen*	-		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Sarasehan hari koperasi	-	-	80 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	*80 Orang*	-		
			Sosialisasi perkoperasian kopsis	-	-	10 Kopsis		-	-	-	-	-	-	-	-	*10 Kopsis*	-		
			Sosialisasi perkoperasian untuk pokmas	-	-	10 Kelompok		-	-	-	-	-	-	-	-	*10 Kelompok*	-		
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Diklat Akuntasi	-	-	30 Orang	276,19	-	-	-	-	-	-	-	-	*30 Orang*	276,19	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Diklat Auditing	-	-	30 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	*30 Orang*	-		
			Pelatihan Kewirausahaan	-	-	30 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	*30 Orang*	-		
			Pelatihan Strategi Pemasaran	-	-	30 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	*30 Orang*	-		
			Pendampingan UKM Persiapan Ekspor	-	-	50 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	*50 Orang*	-		
			Peningkatan pemasaran online untuk produk lokal	-	-	50 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	*50 Orang*	-		
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	**Nilai Kesehatan KSP/USP Koperasi**	**-**	**-**	**43,37%**	**67,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***43,37%***	**67,99**		
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**-**	**-**		**67,99**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**67,99**		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek KSP/USP Kulon Progo	-	-	50 Orang	23,39	-	-	-	-	-	-	-	-	*50 Orang*	23,39	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Laporan pemantauan pengelolaan koperasi KSP/USP	-	-	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	*1 Dokumen*	-		
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan teknis pengembangan koperasi sektor riil	-	-	10 UMKM	44,60	-	-	-	-	-	-	-	-	*10 UMKM*	44,60	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Laporan pendampingan/pemantauan bantuan/ pinjaman	-	-	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	*1 Dokumen*	-		
			Sosialisasi/ koordinasi kemitraan dengan Perbankan/BUMN/BUMD	-	-	90 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	*90 Orang*	-		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	**Indeks Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**-**	**-**	**33,78%**	**404,19**	-	-	-	-	-	-	-	-	**33,78%**	**404,19**		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Indeks Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**-**	**-**	**33,78%**	**208,68**	-	-	-	-	-	-	-	-	**33,78%**	**208,68**		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan Manajemen Profesional Koperasi	-	-	50 Orang	208,68	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Orang	208,68	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Peningkatan Kapasitas Koperasi	-	-	90 Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	90 Orang			

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**-**	**-**	**53,38%**	**195,51**	-	-	-	-	-	-	-	-	**53,38%**	**195,51**		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Pelatihan Kewirausahaan dan Kemitraan UMKM	-	-	27 UMKM	195,51	-	-	-	-	-	-	-	-	27 UMKM	195,51	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Pelatihan Pengembangan Usaha Olahan Tepung Mocaf di Kapanewon Kokap	-	-	27 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	27 UMKM			
			Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Kemitraan Untuk UMKM Kapanewon Nanggulan dan Kapanewon Samigaluh	-	-	27 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	27 UMKM			
			Pelatihan Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Kemitraan Untuk UMKM Sentolo dan Kapanewon Panjatan	-	-	27 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	27 UMKM			
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	**-**	**-**	**53,38%**	**107,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***53%***	**107,23**		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		**-**	**-**		**107,23**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**107,23**		
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Profil KUMKM	-	-	75 Profil	36,80	-	-	-	-	-	-	-	-	*75 Profil*	36,80	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Update Darabase KUMKM (per kelompok, per jenis, sekunder/ primer, konvensional/ syariah)	-	-	4 Database		-	-	-	-	-	-	-	-	*4 Database*	-		
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Pembinaan/ pengawasan koperasi	-	-	16 Koperasi	20,24	-	-	-	-	-	-	-	-	*16 Koperasi*	20,24	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Penilaian Kesehatan KSP/USP	-	-	100 Koperasi		-	-	-	-	-	-	-	-	*100 Koperasi*	-		
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Bimbingan teknis pengembangan bisnis	-	-	25 UMKM	50,19	-	-	-	-	-	-	-	-	*25 UMKM*	50,19	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
			Bimbingan teknis peningkatan kualitas produk UMKM (pemasok TOMIRA)	-	-	25 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	*25 UMKM*	-		
			Pameran manunggal fair	-	-	1 Kali		-	-	-	-	-	-	-	-	*1 Kali*	-		
			Pendaftaran HKI	-	-	10 Merk		-	-	-	-	-	-	-	-	*10 Merk*	-		
			Sosialisasi HKI, P-IRT, BP-POM, Halal dan Standar mutu produk	-	-	25 UMKM		-	-	-	-	-	-	-	-	*25 UMKM*	-		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	***100%***	**2.138,70**	***100%***	**2.275,58**	***100%***	**2.302,09**	***100%***	**2.382,59**	***100%***	**9.098,96**		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 Laporan***	**47,88**	***2 Laporan***	**50,95**	***2 Laporan***	**51,54**	***2 Laporan***	**53,35**	**8 Laporan**	**203,71**		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**-**	*2 Dokumen*	35,73	*2 Dokumen*	38,01	*2 Dokumen*	38,46	*3 Dokumen*	39,80	9 Dokumen	152,00	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**-**	**-**	**-**	**-**	*21 Laporan*	12,16	*21 Laporan*	12,93	*21 Laporan*	13,08	*21 Laporan*	13,54	84 Laporan	51,72	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Capaian Administrasi Keuangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3 Laporan***	**1.810,55**	***3 Laporan***	**1.926,42**	***3 Laporan***	**1.948,85**	***3 Laporan***	**2.016,99**	**12 Laporan**	**7.702,81**		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**-**	**-**	**-**	**-**	*324 Orang/Bulan*	1.761,63	*324 Orang/Bulan*	1.874,38	*324 Orang/Bulan*	1.896,20	*324 Orang/Bulan*	1.962,49	1296 Orang/Bulan	7.494,70	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	**-**	**-**	**-**	**-**	*12 Dokumen*	36,50	*12 Dokumen*	38,84	*12 Dokumen*	39,29	*12 Dokumen*	40,67	48 Dokumen	155,30	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	**-**	**-**	**-**	**-**	*19 Laporan*	12,41	*19 Laporan*	13,21	*19 Laporan*	13,36	*19 Laporan*	13,83	56 Laporan	52,81	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	***2 Laporan***	**52,47**	***2 Laporan***	**55,83**	***2 Laporan***	**56,48**	***2 Laporan***	**58,46**	**8 Laporan**	**223,24**		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	5 Paket	15,76	5 Paket	16,77	5 Paket	16,97	5 Paket	17,56	20 Paket	67,07	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	12 Laporan	36,71	12 Laporan	39,06	12 Laporan	39,51	12 Laporan	40,90	48 Laporan	156,17	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	-	-	-	-	***1 Laporan***	**12,99**	***1 Laporan***	**13,82**	***1 Laporan***	**13,98**	***1 Laporan***	**14,47**	**4 Laporan**	**55,27**		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	3 Unit	12,99	3 Unit	13,82	*3 Unit*	13,98	3 Unit	14,47	12 Unit	55,27	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang**	-	-	-	-	***2 Laporan***	**117,04**	***2 Laporan***	**124,53**	***2 Laporan***	**125,99**	***2 Laporan***	**130,40**	**8 Laporan**	**497,96**		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	3 Laporan	37,02	3 Laporan	39,39	3 Laporan	39,85	3 Laporan	41,25	12 Laporan	157,52	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	12 Laporan	80,02	12 Laporan	85,14	12 Laporan	86,13	12 Laporan	89,15	48 Laporan	340,44	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	-	-	-	-	***2 Laporan***	**97,77**	***2 Laporan***	**104,03**	***2 Laporan***	**105,24**	***2 Laporan***	**108,93**	**8 Laporan**	**415,97**		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak atau Perizinannya	-	-	-	-	16 Unit	55,26	16 Unit	58,79	16 Unit	59,48	16 Unit	61,56	64 Unit	235,10	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-	30 Unit	42,51	31 Unit	45,23	31 Unit	45,76	31 Unit	47,36	123 Unit	180,87	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**80,87%**	**-**	**60,55%**	**-**	**62,18%**	**355,65**	**63,93%**	**378,30**	***65,69%***	**382,71**	**67,52%**	**396,09**	**67,52%**	**1.512,75**		
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62,18%**	**355,65**	**63,93%**	**378,30**	***65,69%***	**382,71**	**67,52%**	**396,09**	**67,52%**	**1.512,75**		
		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	111 Unit Usaha	212,50	113 Unit Usaha	226,03	*119 Unit Usaha*	228,67	120 Unit Usaha	236,66	463 Unit Usaha	903,87	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	-	-	-	-	*13 Unit Usaha*	143,15	*13 Unit Usaha*	152,27	*13 Unit Usaha*	154,04	*13 Unit Usaha*	159,43	52 Unit Usaha	608,88	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	**-**	**-**	**92,68%**	**-**	***95,24%***	**576,20**	***96,19%***	**594,20**	***97,31%***	**613,20**	**98,46%**	**633,20**	**98,46%**	**2.416,80**		
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	**-**	**-**	**-**	**-**	***95,24%***	**380,69**	***96,19%***	**398,69**	***97,31%***	**417,69**	**98,46%**	**437,69**	**98,46%**	**1.634,75**		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	-	-	-	*565 Orang*	380,69	*565 Orang*	398,69	*565 Orang*	417,69	*565 Orang*	437,69	2260 Orang	1.634,75	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi**	**-**	**-**	**-**	**-**	***95,24%***	**195,51**	***96,19%***	**195,51**	***97,31%***	**195,51**	**98,46%**	**195,51**	**98,46%**	**782,05**		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami UKM	-	-	-	-	*135 Orang*	195,51	*135 Orang*	195,51	*135 Orang*	195,51	*135 Orang*	195,51	540 Orang	782,05	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**19,03%**	**-**	**9,15%**	**-**	***3,67%***	**107,51**	***4,09%***	**114,35**	***4,73%***	**115,69**	**5,67%**	**119,72**	**5,67%**	**457,27**		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	**-**	**-**	**-**	**-**	***3,67%***	**107,51**	***4,09%***	**114,35**	***4,73%***	**115,69**	**5,67%**	**119,72**	**5,67%**	**457,27**		
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisai Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**-**	**-**	**-**	**-**	*39.000 Unit Usaha*	20,00	*39.000 Unit Usaha*	22,28	*39.000 Unit Usaha*	22,78	*39.000 Unit Usaha*	24,28	39.000 Unit Usaha	89,34	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	**-**	**-**	**-**	**-**	*120 Unit Usaha*	25,00	*120 Unit Usaha*	27,28	*120 Unit Usaha*	27,78	*120 Unit Usaha*	29,27	480 Unit Usaha	109,33	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	**0,95%**	**-**	**2,99%**	**-**	*168 Unit Usaha*	62,51	*168 Unit Usaha*	64,79	*168 Unit Usaha*	65,13	*168 Unit Usaha*	66,17	672 Unit Usaha	258,60	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
		Program Pengembangan UMKM	**Persentase Pengembangan UMKM**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1,49%***	**174,23**	***1,79%***	**190,00**	***2,09%***	**209,00**	**2,39%**	**227,90**	**2,39%**	**801,13**		

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun Awal Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
				Capaian		Target		Target		Target		Target		Target					
				Capaian	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase Pengembangan UMKM**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1,49%***	**174,23**	***1,79%***	**190,00**	***2,09%***	**209,00**	**2,39%**	**227,90**	**2,39%**	**801,13**		
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	-	-	-	*250 Unit Usaha*	174,23	*250 Unit Usaha*	190,00	*250 Unit Usaha*	209,00	*250 Unit Usaha*	227,90	1000 Unit Usaha	801,13	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**					***1 Kali***	**221,59**	***1 Kali***	**221,59**	***1 Kali***	**221,59**	***1 Kali***	**221,59**	**4 Kali**	**886,36**		
		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	**Capaian Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	***1 Kali***	**221,59**	***1 Kali***	**221,59**	***1 Kali***	**221,59**	***1 Kali***	**221,59**	**4 Kali**	**886,36**		
		Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	-	-	-	-	*115 Unit*	221,59	*115 Unit*	221,59	*115 Unit*	221,59	*115 Unit*	221,59	460 Unit	886,36	Dinas Koperasi dan UKM	Lingkup Kab. KP

BAB 7
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM ditetapkan untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kulon Progo tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026

No	Sasaran Perangkat Daerah/IKU Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran Daerah/IKU Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	TARGET					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD KP
					Transisi	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	2023-2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kinerja koperasi dan UKM	Nilai Rata-rata Volume Usaha Koperasi	Rp.	1.154.593.781,31	612.795.284	685.949.407,00	687.217.981,00	688.616.929,00	690.149.936,00	690.149.936,00
		Pertumbuhan omzet UMKM yang Difasilitasi	Rp.	17,66%	70.749.114.000,00	76.843.230.000,00	84.155.805.000,00	92.344.485.500,00	101.472.659.000,00	101.472.659.000,00
		Rata-Rata Prosentase Pencapaian Program Pada Masig-masing Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	TARGET					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPD KP
					Transisi	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	2023-2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	80,87	60,55	62,18	63,93	65,69	67,52	67,52
2	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	%	12,00	92,68	95,24	96,19	97,31	98,46	98,46
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	%	19,03	9,15	3,67	4,09	4,73	5,67	5,67
4	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	%	0,95	2,99	1,49	1,79	2,09	2,39	2,39

BAB 8
PENUTUP

1.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah penjabaran dari RPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026 serta merupakan kesinambungan dari RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022, sebagai bagian dari RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-OPD) dan selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD). Sehubungan dengan hal tersebut ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPD Tahun 2023-2026.
2. Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo memiliki kewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Konsepsi prioritas dalam naskah dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 baik mengenai aspek program dan kegiatan maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan kegiatan serta wilayah prioritas baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program dan kegiatan maupun wilayah non prioritas
4. Konsepsi deskripsi program dan kegiatan pada dokumen Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 ini tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, akan tetapi lebih kepada logika alur berfikir pentingnya sebuah program maupun kegiatan pokok dalam mewujudkan sasaran pembangunan

1.3 Rencana Tidak Lanjut

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2023 – 2026.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023- 2026, maka Dinas Koperasi dan UKM berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Tahun 2023-2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026. Dinas Koperasi dan UKM juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Perubahan Renstra Tahun 2023-2026.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : Desember 2022

Kepala

Iffah Mufidati, S.H., MM.
NIP. 19700117 199603 2 004

LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo

Lampiran 2 : Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan UKM

Lampiran 3 : Bagan Alir Kesesuaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 dan RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

Lampiran 1

Metadata Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo

No	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	TARGET					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
				Transisi	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah								
1	Nilai Rata-rata Volume Usaha Koperasi	Rp.	Rata-rata volume usaha koperasi dalam satu daerah	612.795.284	685.949.407,00	687.217.981,00	688.616.929,00	690.149.936,00	690.149.936,00
2	Pertumbuhan omzet UMKM yang Difasilitasi	Rp.	Jumlah omzet UMKM yang difasilitasi OPD	70.749.114.000,00	76.843.230.000,00	84.155.805.000,00	92.344.485.500,00	101.472.659.000,00	101.472.659.000,00

Lampiran 2

Metadata Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi dan UKM Kulon Progo

No	Program	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	TARGET					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Transisi	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Indikator Program								
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	(Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam satu tahun x 100%)+ (Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu) + (Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu)+(Persentase aset kondisi baik)+(Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat)/6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam satu tahun x 100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran	12	12	12	12	12	60
				Jumlah bulan dalam satu tahun	12	12	12	12	12	60
				Persentase jumlah dokumen perencanaan yang disampaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu	3	2	2	2	3	3

No	Program	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	TARGET					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Transisi	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah Dokumen Perencanaan OPD (Renstra OPD, Renja OPD) dalam RPJMD	3	2	2	2	3	3
				Persentase jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	19	19	19	19	19	19
				Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan OPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja Pelayanan OPD, 2 dok SPIP)	19	19	19	19	19	19
				Persentase Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD disampaikan tepat waktu	16	16	16	16	16	16

No	Program	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	TARGET					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Transisi	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program OPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)	16	16	16	16	16	80
				Persentase aset kondisi baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah aset kondisi baik tahun ke-n						
				Jumlah keseluruhan asset selama 5 tahun						
				Persentase realisasi pegawai mengikuti diklat	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)						
				Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)						
				DO : Aset yang dikelola OPD adalah seluruh aset yang dikelola OPD kecuali aset yang sudah diusulkan penghapusan (surat usulan penghapusan)						

No	Program	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	TARGET					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Transisi	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	(((Jumlah KSP/USP yang mempunyai kategori sehat pada tahun ke n / Jumlah KSP/USP yang dinilai pada tahun ke n) / (Jumlah koperasi aktif tahun ke n / jumlah koperasi tahun ke n))/2)*100%	60,55	62,18	63,93	65,69	67,52	67,52
				Jumlah KSP/USP sehat tahun ke n (unit)	55	30	34	37	40	40
				Jumlah KSP/USP yang dinilai pada tahun ke n-1 (unit)	75	92	95	98	98	98
				Jumlah koperasi aktif tahun ke n (unit)	244	246	248	255	259	259
				Jumlah koperasi tahun ke n (unit)	276	278	280	283	286	286
				DO : Jumlah KSP/USP sehat tahun ke n merupakan hasil dari penilaian tahun ke n-1						
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Peningkatan Pendidikan dan Latihan Koperasi	%	(Jumlah anggota koperasi yang meningkat kapasitasnya tahun ke n / jumlah anggota koperasi yang mengikuti bimtek tahun ke n)*100%	92,68	95,24	96,19	97,31	98,46	98,46
				Jumlah anggota koperasi yang meningkat kapasitasnya tahun ke n	190	200	202	253	256	256,00
				Jumlah anggota koperasi yang mengikuti bimtek tahun ke n	205	210	210	260	260	260,00
				DO : Meningkat kapasitasnya diukur dengan pre test dan post test						

No	Program	Indikator	Satuan	Cara Penghitungan	TARGET					Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD
					Transisi	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	%	((((Jumlah UMKM tahun ke n - Jumlah UMKM tahun ke n-1) / Jumlah UMKM tahun ke n-1) + ((jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n - jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n-1) / jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n-1)) / 2)*100%	9,15	3,67	4,09	4,73	5,67	5,67
				Jumlah UMKM tahun ke n (unit)	45712	46.238	47.065	48.387	50.271	50.271,00
				Jumlah UMKM tahun ke n-1 (unit)	44.478	45.651	46.238	47.065	48.387	48.387,00
				Jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n (Rupiah)	13.729.846.160	14.561.362.111	15.492.978.062	16.524.794.013	17.756.709.964	17.756.709.964
				Jumlah modal UMKM dari kemitraan tahun ke n-1 (Rupiah)	11.885.134.620	13.729.846.160	14.561.362.111	15.492.978.062	16.524.794.013	17.756.709.964
				DO : Modal UMKM dari kemitraan adalah modal pinjaman						
5	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	%	(Jumlah UMKM naik kelas tahun ke n/ Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi tahun ke n-1)* 100%	2,99	1,49	1,79	2,09	2,39	2,39
				Jumlah UMKM naik kelas tahun ke n	20	5	6	7	8	8
				Jumlah UMKM yang mendapat fasilitasi tahun ke n-1 (unit)	669	335	335	335	335	335
				DO : UMKM naik kelas diukur dari kenaikan aset dan omset (sesuai UU UMKM) angka absolut						

Lampiran 3

Bagan Alir Kesesuaian Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo 2023-2026 dan RPD Kabupaten Kulon Progo 2023-2026

RPJMD KAB. KP

TUJUAN

Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

SASARAN

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Indikator Sasaran

1. Pendapatan perkapita penduduk (ADHB)
2. Angka pengangguran terbuka

RENSTRA DINKOP UKM KAB. KP

TUJUAN

Terwujudnya Peran dan Fungsi Koperasi dan UMKM

SASARAN

Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM

Indikator

Nilai rata-rata volume usaha koperasi yang difasilitasi (Rp/jt)
Pertumbuhan jumlah omzet UMKM yang difasilitasi (Rp/jt)

Target			
2023	2024	2025	2026
685,94	687,21	688,61	690,14
76.843,23	84.155,805	92.344,48	101.472,65

PROGRAM:

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Pendidikan dan Latihan Koperasi, pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), dan pengembangan UMKM